

## Integrasi Etika Dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Bayu Anggoro Putro<sup>1</sup>, Lussy Anggraini<sup>2</sup>,  
Luthfy Nadya Fathni<sup>3</sup>, Resi Anjarsari<sup>4</sup>, Ibna Resa<sup>5</sup>

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: [putrobayu88@gmail.com](mailto:putrobayu88@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article Info

#### Article history:

Submission, 05, 07, 2025

Revised 05, 18, 2025

Accepted 05, 27, 2025

#### Corresponding Author:

[putrobayu88@gmail.com](mailto:putrobayu88@gmail.com)

Copyright© Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan. All Right Reserved. This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

#### Correspondence Address:

[al\\_ikhtibar@iainlangsa.ac.id](mailto:al_ikhtibar@iainlangsa.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine one of the important foundations of the independent curriculum, namely how ethics are integrated into the independent curriculum policy and to find out the supporting and inhibiting factors along with problem solutions. The method used is a qualitative approach and the type of research emphasized is literature study. Through the post-positivism paradigm which provides data interpretation based on facts sourced from scientific journals and books associated with ethical theory. The results and discussion show that the integration of ethics is urgent to be applied to independent curriculum learning at elementary, secondary, and higher education levels by looking at the characteristics of each student. Findings of internal supporting factors were obtained, namely (a) Support from leaders; (b) Commitment of students, students, teachers, and lecturers; (c) Positive orientation of education policy makers. External supporting factors include: (a) Collaboration between parents and the community; and (b) Development of the times. In addition, internal inhibiting factors were found: (a) Limited facilities and infrastructure; and (b) Lack of teacher and lecturer training, while the external factors were: (a) Existence of SARA conflicts; and (b) The influence of media and technology.*

**Keywords:** *Ethics, Independent Curriculum, Education*

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk mengkaji salah satu landasan penting dalam kurikulum merdeka yakni bagaimana integrasi etika dalam kebijakan kurikulum merdeka dan mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambatnya disertai solusi permasalahan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang ditekankan yakni studi literatur. Melalui paradigma post-positivisme yang memberikan interpretasi data berdasarkan fakta yang bersumber dari jurnal*

*ilmiah dan buku yang dikaitkan dengan teori etika. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa integrasi etika urgensi untuk diterapkan pada pembelajaran kurikulum merdeka baik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan melihat karakteristi setiap peserta didik. Diperoleh temuan faktor pendukung internal yakni (a) Dukungan pimpinan; (b) Komitmen peserta didik, mahasiswa, guru, dan dosen; (c) Orientasi positif pemangku kebijakan pendidikan. Faktor pendukung eksternal diantaranya: (a) Kolaborasi orang tua dan masyarakat; dan (b) Perkembangan zaman. Selain itu, ditemukan faktor penghambat internal: (a) Keterbatasan sarana dan prasarana; dan (b) Kurangnya pelatihan guru dan dosen, sedangkan faktor eksternalnya yakni: (a) Adanya konflik SARA; dan (b) Pengaruh media dan teknologi.*

**Kata Kunci:** *Etika, Kurikulum Merdeka, Pendidikan*

## A. PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari pendidikan memiliki kapasitas penting dalam peradaban suatu bangsa, karena pendidikan yang berkualitas dapat menumbuhkan karakter, keterampilan, dan pemahaman setiap manusia (Magay dan Ismanto, 2024). Hal ini diperkuat dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana guna membentuk generasi yang memiliki fondasi spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, kecakapan, kreatif, mandiri, maupun menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ketika generasi terdidik, maka akan lebih sanggup untuk memahami permasalahan kehidupan yang kompleks. Oleh karena itu, pendidikan menunjukkan multiplier effect atau efek berganda yakni membantu untuk meminimalisir kemiskinan, kebodohan, menunjang kesetaraan gender, dan berupaya mencapai perdamaian (Rambe, 2024). Namun, pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya yakni adanya krisis etika. Sering dijumpai nilai-nilai yang penting untuk kemanusiaan seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, hormat terhadap sesama martabat manusia kerap diabaikan. Pada lingkungan masyarakat berbagai praktik korupsi, kolusi, manipulasi, dan nepotisme selama ini menggerogoti sendi-sendi etika dalam pendidikan (Tanyid, 2024). Tidak hanya itu, permasalahan etika juga masih terjadi di sekolah dan pendidikan tinggi juga sangat beragam mulai dari masalah yang dihadapi peserta didik, mahasiswa, guru maupun dosen, hingga masalah etika yang lebih luas yakni melibatkan anggota sekolah serta universitas. Permasalahan yang terjadi seperti kecurangan dalam ujian, adanya kekerasan secara fisik serta verbal, maraknya perundungan, diskriminasi, pelanggaran hak cipta, dan kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan (Amalia, et al 2025). Maka dari itu, etika memainkan peran penting dalam membentuk praktik dan hasil pendidikan, sehingga dibutuhkan

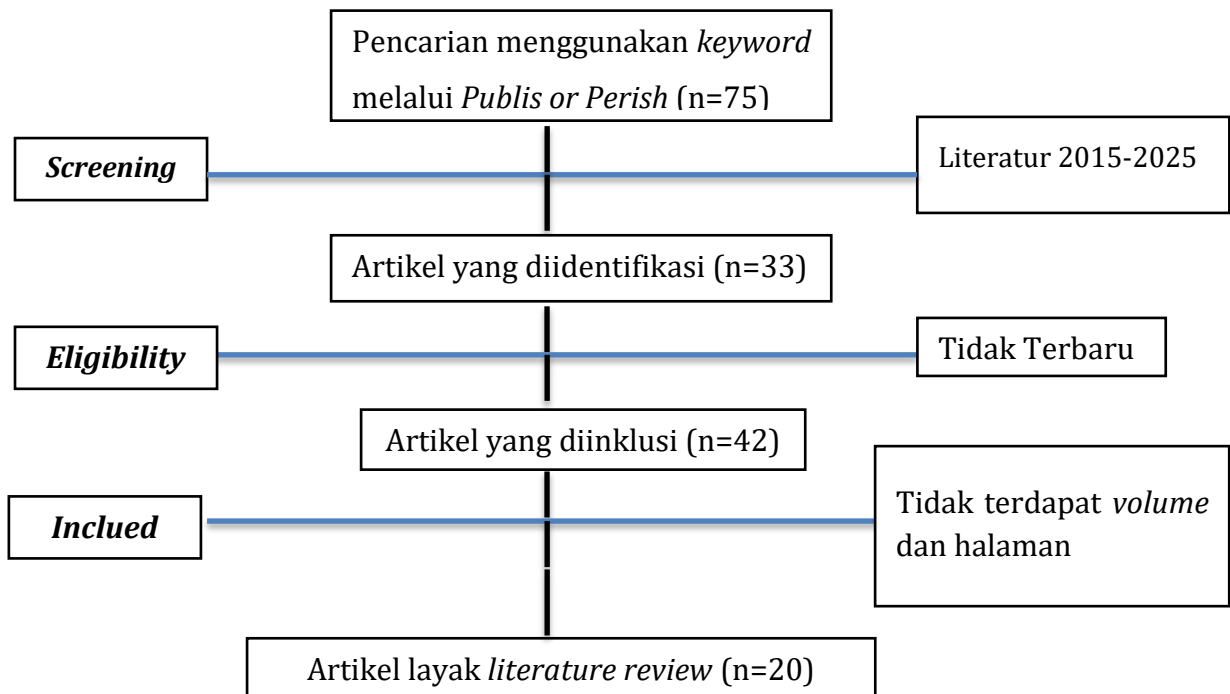
kurikulum yang menepatkan pada kebutuhan serta situasi pendidikan di Indonesia.

Kurikulum memiliki urgensi dalam bidang pendidikan karena menjadi panduan utama dalam proses pendidikan. Artinya, sebagai landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang berbentuk program atau kegiatan-kegiatan bernilai positif. Selain itu, kurikulum mendukung dalam menentukan metode pembelajaran. Menegaskan, suatu cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan edukasi sebagai kontrol pendidikan agar dapat memperkuat input, process, dan output pendidikan dan meminimalisir terjadinya permasalahan yang bersifat negatif dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, kurikulum sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang relevan. Dengan demikian, pemangku kebijakan juga mempertimbangkan etika dalam pembentukan kurikulum (Anri, 2024). Pembaharuan kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin terlaksana sejalan dengan peradaban zaman. Era ini kurikulum yang diimplementasikan di Indonesia yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan pemikiran pendidikan yang mengusung gagasan bahwa pendidikan perlu menjadi lebih fleksibel serta responsif terhadap tuntutan masyarakat serta kebutuhan peserta didik.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kurikulum merdeka dilakukan secara bertahap, tidak diterapkan secara serentak pada seluruh tingkatan atau di setiap institusi pendidikan. Proses ini bertujuan untuk melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kelebihan dan kelemahan kurikulum merdeka (Amanullah dan Waslla, 2024). Sebagai suatu inovasi, kurikulum merdeka diimplementasikan tentu memiliki harapan untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum merdeka tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Selain itu, juga terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Keberhasilan kurikulum ini diukur bukan hanya dari segi hasil akhir (output), melainkan juga dari dampak yang dihasilkan (outcome) yang dapat menjadi nilai tambah bagi pendidikan dan lingkungan global. Kurikulum merdeka harus memperhatikan berbagai landasan seperti filosofi, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan etika. Maka sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji salah satu landasan penting dalam kurikulum merdeka yakni bagaimana integrasi etika dalam kebijakan kurikulum merdeka yang semestinya serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat integrasi etika dalam kebijakan kurikulum merdeka.

## B. Metodologi Penelitian

Integrasi etika dalam kebijakan kurikulum merdeka sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang ditekankan adalah studi literatur. Pendekatan studi literatur untuk menemukan penelitian yang relevan serta mencari tahu research gap dengan penelitian ini untuk menjadi keterbaruan. Metode ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah terkini mengenai etika, kebijakan, dan kurikulum merdeka. Terdapat sejumlah langkah pendekatan studi literatur dalam penelitian ini diantaranya pengumpulan data, pengolahan data, penyajian hasil, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu post-positivisme. Paradigma ini menyatakan suatu hal tidak mungkin mencapai suatu klaim kebenaran, jika peneliti mengambil jarak dengan dengan hal yang diteliti. Oleh karena itu, hubungan peneliti harus bersifat interaktif dengan catatan peneliti bersifat netral, sehingga dapat meminimalisir terjadinya subyektivitas. Paradigma post positivisme seyogyanya menggunakan metode, sumber data, dan teori untuk mendukung penelitian (Irawati, et al 2021). Objektivitas sebagai konsep kebenaran yang melandasi semua eksplorasi. Melalui paradigma post-positivisme ini dapat memberikan interpretasi data mengenai etika dalam kebijakan kurikulum merdeka berdasarkan fakta yang bersumber dari sumber data yang dikaitkan dengan teori.



## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Etika

Etika itu merupakan filsafat mengenai nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk. Etika yakni mempelajari perihal tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana faktanya, tetapi juga menyelidiki kebaikan atau manfaat dari keseluruhan tingkah laku manusia. Etika dalam konteks kebijakan pendidikan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk menentukan tujuan pendidikan yang tidak hanya berfungsi secara efektif, tetapi juga sejalan dengan standar masyarakat. Etika mendorong kebijakan pendidikan yang memberikan manfaat maksimal, menekankan pada kebaikan dan keadilan agar kebijakan pendidikan tidak merugikan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, etika dalam kebijakan pendidikan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi dari setiap pelaksanaan pendidikan. Etika memperkuat guna meminimalisir konflik nilai yang mungkin muncul dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip moral yang diakui. Etika memberikan pandangan dalam memastikan bahwa hak-hak dasar manusia harus diakui, dihormati, dan dilindungi dalam setiap kebijakan pendidikan yang diimplementasikan. Oleh sebab itu, etika dalam kebijakan pendidikan dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang guna membangun dan mempertahankan dukungan masyarakat, peserta didik, guru, dan komponen lainnya terhadap pendidikan. Etika ini merupakan bagian dari akhlak, karena bukanlah sekadar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, religius, dan syari'ah, karena etika cakupannya sangat luas dan sangat berperan dalam mutu pendidikan (Wirata, 2024).

### 2. Perbedaan Etika dan Etiket

Etika dan etiket memiliki persamaan menyangkut manusia yang membedakan dari makhluk hidup lainnya dan mengatur perilaku secara normatif dalam memberikan norma pada perilaku manusia berupa suatu hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Namun, etika dan etika juga memiliki perbedaan, untuk dapat menelaah dan mempelajari bagaimana perbedaan etika dengan etika berdasarkan (Yusuf, 2021) sebagai berikut: (a) Etika menyangkut perbuatan yang boleh dan tidak boleh dan tidak boleh dilakukan; (b) Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri; (c) Etika bersifat absolut atau mutlak; (d) Etika memandang manusia dari dalam; dan (e) Etika selalu berlaku baik saat sedang sendiri maupun bersama orang lain. Sedangkan etiket yakni: (a) Menyangkut tata cara perbuatan yang tepat yang diharapkan dan ditentukan dalam kalangan tertentu; (b) Etiket hanya berlaku dalam pergaulan dimana berlaku dalam situasi manusia tidak seorang diri, bila tidak ada orang lain atau saksi mata, maka etiket tidak berlaku; (c) Etiket bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa

saja dianggap sopan oleh kebudayaan lain; (d) Etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja.

### 3. Teori Etika

Teori etika memberikan panduan untuk memahami dan mengevaluasi tindakan manusia serta membantu individu dan kelompok dalam memahami dan memberikan kerangka kerja untuk bertindak dalam berbagai situasi. Berbagai teori mengenai etika diantaranya (Wirata, 2024): (a) Teori Utilitarian. Teori ini menilai kebaikan adalah atau keburukan suatu tindakan berdasarkan prinsip kemanfaatan atau kebahagiaan yang dihasilkan. Tindakan yang dianggap etis ialah tindakan yang memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu. Teori utilitarian tidak hanya mengukur kuantitas tetapi juga kualitas kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu kebijakan. Utilitarian bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan mengutamakan kesejahteraan umum yang dapat tercermin pada bidang kebijakan seperti pendidikan. Integrasi etika keadilan dan penghormatan hak asasi manusia penting untuk membentuk kebijakan yang holistik, sejalan dengan nilai-nilai fundamental kemanusiaan; (b) Teori Deontologi. Teori ini berpacu pada tindakan dan aturan moral itu sendiri bukan pada hasil. Deontologi juga menjelaskan bahwa ada kewajiban moral yang harus diikuti, tanpa memandang konsekuensi. (c) Teori Keberagaman. Teori ini menyoroti pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan, nilai, dan budaya dalam masyarakat. Interaksi antarbudaya menjadi bagian integral dari etika keberagaman yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kebijakan termasuk kebijakan pendidikan. Implementasi etika keberagaman dalam kebijakan pendidikan dapat terlihat melalui desain kurikulum. Etika keberagaman merujuk bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan bijaksana. Etika keberagaman menolak segala wujud diskriminasi dan menjamin setiap manusia dapat berpartisipasi dalam kebijakan.

### 4. Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (policy) dimaknai sebagai ketentuan, aturan, dan rencana strategis. Artinya, kebijakan merujuk pada pemangku kebijakan sebagai penyelenggara yang ditunjukkan kepada masyarakat secara luas. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yakni (pedagogie) yang diartikan sebagai bimbingan atau edukasi. Dengan begitu, pendidikan mengupayakan segala potensi yang meliputi karakter, pemikiran, dan kemauan yang ada pada diri manusia untuk dibimbing menuju lebih baik. Maka, kebijakan pendidikan adalah kesatuan teori serta praktik pendidikan yang mengarahkan pada tatanan kehidupan manusia yang berkaitan dengan berbagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan (Pratiwi, 2024).

### 5. Tahap-Tahap Penyusunan Kebijakan Pendidikan

Tahap-tahap penyusunan kebijakan pendidikan dilakukan oleh pemangku kebijakan yang berfokus pada bidang pendidikan. Pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan terdiri dari politisi, pakar pendidikan, akademisi, serta praktisi

pendidikan yang tergabung dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Terdapat beberapa tahap kebijakan pendidikan berdasarkan (Dunn, William 2013) sebagai berikut: (a). Penyusunan Agenda. Tahap ini ialah merumuskan kebijakan pendidikan yang berangkat dari masalah atau agenda publik; (b) Formulasi Kebijakan. Tahap ini merumuskan berbagai opsi-opsi alternatif kebijakan guna mengatasi masalah pendidikan yang telah masuk pada agenda publik sebelumnya; (c). Adopsi Kebijakan. Tahap penentuan keputusan dari berbagai alternatif pilihan yang mendapatkan dukungan dan analisis yang tepat untuk ditetapkan menjadi sebuah kebijakan pendidikan; (d) Implementasi Kebijakan. Tahap ini memasuki pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, dilakukan penilaian dan monitoring; (e) Evaluasi Kebijakan. Tahap ini melakukan pemeriksaan oleh beberapa pihak seperti eksekutif, legislatif, dan peradilan. Bagaimana kebijakan pendidikan telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat untuk mencapai tujuan pendidikan.

## 6. Perkembangan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka menunjukkan perkembangan yang dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti kemajuan teknologi dan informasi, perluasan ilmu pengetahuan, pola hidup manusia, maupun persaingan serta perubahan visi atau misi bangsa. Kurikulum merdeka ialah kurikulum dengan menitikberatkan pada kebebasan belajar bagi peserta didik, mahasiswa, dan guru yang dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam menghadirkan nuansa pembelajaran mandiri. Proses pembelajaran tersebut, menekankan kebebasan dan kekuatan kepada setiap institusi supaya independen dari manajemen yang berantakan. Kurikulum merdeka dicanangkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2020-2024, kurikulum ini sudah terlaksana selama lima tahun. Perkembangan kurikulum merdeka tidak lupa dengan landasan historis penerapan kurikulum sebelumnya (Putri dan Maula, 2024). Diawali dengan kurikulum rencana pelajaran 1947 yang mana kurikulum ini terdapat evaluasi yakni kurang menekankan pada ranah kognitif; (b). Kurikulum 1952 yang mana evaluasi kurikulum ini mencakup aspek konten, metode pembelajaran, dan keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat; (c). Kurikulum 1964 dan 1968 yang mana kurikulum 1964 belum komprehensif karena hanya berlaku di sekolah dasar, sedangkan evaluasi kurikulum 1968 dikarenakan guru lebih cenderung aktif daripada peserta didik; (d). Kurikulum 1975 yang mana adanya evaluasi mengenai ketidakselarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (e). Kurikulum 1984 yang mana beban berat dirasakan oleh peserta karena semakin tinggi tingkat kelasnya, maka semakin banyak pula materi yang diberikan. Selain itu, guru juga belum diberikan pelatihan dikarenakan keterbatasan biaya untuk membuat guru memahami konsep belajar CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dan kurangnya sarana sekolah yang

memadai; (f). Kurikulum 1994 yang mana materi pembelajaran kurang bermakna karena tidak terkait dengan penerapan kehidupan sehari-hari; (g). Kurikulum 2004 kurikulum ini masih mengalami kesulitan karena guru masih cenderung mengajar dengan pendekatan yang konvensional dan tanpa melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran; (h). Kurikulum 2006 yang mana masih bergantung pada ujian nasional sebagai tolok ukur keberhasilan peserta didik, sehingga dapat memabatasi pengembangan potensinya secara menyeluruh; dan terakhir (i) Kurikulum 2013 yang mana kurikulum ini berkutat pada hasil pembelajaran bukan pada prosesnya dan guru masih merasakan kendala memberikan penelitian yang obyektif dan komprehensif.

## 7. Integrasi Etika dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka diterapkan di seluruh jenjang pendidikan baik pendidikan usia dini, penddikan sekolah dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini untuk menyesuaikan dengan situasi setiap satuan pendidikan. Kurikulum merdeka memungkinkan merencanakan kurikulum operasional yang selaras dengan visi, misi, tujuan, kondisi sekolah, dan karakteristik peserta didik dan mahasiswa. Oleh karena itu, adanya integrasi etika penting terlibat dalam proses pelaksanaan kurikulum merdeka di setiap jenjang. Pertama, yakni pada jenjang pendidikan anak usia dini. Perlu diketahui, pembelajaran jenjang ini didasarkan pada fleksibilitas, berpusat pada peserta didik usia (3-6 tahun), memperhitungkan perkembangan sosial, emosional, dan kognitif secara seimbang. Integrasi etika pada kurikulum merdeka jenjang pendidikan usia dini menjadi aspek penting untuk memulai karakter peserta didik sejak usia dini (Nasution, 2024). Integrasi etika dalam pembelajaran kurikulum merdeka di jenjang pendidikan usia dini diintegrasikan pada pembelajaran berbasis proyek kecil seperti berbagi bekal makanan dan minuman, peserta didik juga bisa diajak untuk saling meminjamkan mainan, dan menanam pohon bersama yang dapat mengajarkan nilai etika tanggung jawab dan kepedulian kepada anak.

Kemudian, mengintegrasikan etika pada pembelajaran bercerita dan pembiasaan keteladanan seperti guru memotivasi peserta didik untuk berbagi perasaannya baik perasaan senang, sedih, ataupun marah yang nantinya akan diberikan umpan balik oleh guru dan melakukan kegiatan kreatif menggambar atau membuat kerajinan tangan anak-anak dapat diajak untuk saling berbagi ide dan saran. Hal ini akan memacu anak memiliki nilai etika kasih sayang terhadap guru atau orang yang lebih dewasa, menghargai perbedaan, dan kreativitas karena mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru sesuai dengan gagasannya. Integrasi etika dalam proses pembelajaran permainan edukatif juga tidak kalah pentingnya, seperti puzzle yang membantu menumbuhkembangkan keterampilan kognitif dalam pemecahan masalah, visual-motorik, dan mengenali bentuk serta menyelesaikan puzzle. Selanjutnya, permainan edukatif menyortir benda atau obyek guna mengembangkan

kemampuan memahami warna, bentuk, kategori, dan peserta didik dapat belajar mengkategorikan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Keseluruhan permainan edukatif tersebut mampu dintonjolkan sebagai metode pembelajaran yang interaktif dan mewujudkan nilai etika kesabaran, percaya diri, dan kecerdasan intelektual. Diakhiri, dengan melakukan integrasi etika pada pembelajaran kurikulum merdeka di jenjang pendidikan anak usia dini yakni membuat kelompok bermain atau belajar peserta didik. Kegiatan ini dicontohkan seperti seni pertunjukkan atau seni bermain peran. Integrasi ini dapat merealisasikan nilai etika kerja sama dan toleransi yang berkesan pada peserta didik untuk menjaga kedamaian dan menumbuhkan rasa saling pengertian antara individu dan kelompok.

Kedua, memasuki jenjang pendidikan dasar. Karakteristik dari peserta didik di jenjang pendidikan sekoah dasar diantaranya:

- a. Peserta didik jenjang sekolah dasar masih senang dalam bermain. Diartikan bahwa kegiatan bermain memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial-emosional, dan fisik (Muna, 2024). Oleh karena itu, etika dapat diintegrasikan pada pembelajaran yang menyenangkan untuk menghasilkan kegiatan bermain yang bermanfaat pada peserta didik jenjang sekolah dasar. Misalnya, integrasi etika pada pembelajaran story telling dan bingo, etika yang diberdayakan yakni etika komunikatif, etika rasa ingin tahu, dan etika gemar membaca. Peserta didik jenjang sekolah dasar sangat menyukai bercerita sebagai kegiatan bermain, menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan materi pembelajaran yang mengandung nilai moral membuat peserta didik menumbuhkan imajinasi dan terhubung dengan materi yang diajarkan. Sedangkan permainan bingo dapat meningkatkan motivasi, menstimulasi kemampuan berpikir, pemahaman konsep, dan percaya diri peserta didik;
- b. Senang merasakan atau melakukan kegiatan secara langsung. Hal ini tercermin bahwa etika dapat dileburkan pada pembelajaran berbasis pengalaman seperti peserta didik belajar mengenai penanggulangan dan keselamatan bencana. Kegiatan tersebut dapat diperoleh secara langsung dari Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab pemadam kebakaran, cara memadamkan api, dan cara mencegah terjadinya kebakaran. Dengan pembelajaran berbasis pengalaman, dapat merepresentasikan atau mengintegrasikan nilai etika keberanian, sungguh-sungguh, dan disiplin terhadap diri peserta didik dan sekitarnya;
- c. Senang bekerja dalam kelompok. Etika dapat diintegrasikan pada pembelajaran tematik untuk peserta didik aktif dalam diskusi. Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik untuk mengalami sendiri proses pembelajarannya karena menghubungkan antara pengetahuan suatu bidang dengan bidang lainnya, menghubungkan satu pengalaman dengan pengalaman

yang lain, bahkan menghubungkan pengetahuan dan pengalaman. Integrasi etika dengan menyisipkan pesan moral dalam dalam setiap tema-tema pembelajaran. Ketika peserta didik melaksanakan pembelajaran tematik merepresentasikan nilai etika religius, nasionalis, dan gotong royong.

Ketiga, memasuki jenjang pendidikan menengah. Karakteristik dari peserta didik jenjang sekolah menengah baik pertama dan dasar diantaranya: (a). Menggemari literatur yang mengandung nilai-nilai filosofis, religius, bahkan etis; (b). Sudah mampu mengoperasikan kaidah pemikiran formal serta kompetensi membuat generalisasi yang bersifat konklusif dan komprehensif; (c) Memiliki kecenderungan bakat yang mencapai puncak kmantapannya; (f) Mulai menunjukkan eksistensi pribadi dan rasa ingin tahu yang tinggi; (d) Interaksi dalam kemudahan bergaul semakin meningkat. Dengan memperhatikan karakteristik yang ada pada peserta didik jenjang sekolah menengah, maka integrasi dalam kurikulum merdeka sebaiknya menyesuaikan (Bustamam, 2022).

Integrasi dalam proses pembelajaran dapat dilakukan melalui penanaman-penanaman nilai etika dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sebagai kegiatan pembelajaran tambahan yang berfungsi mengembangkan potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang beragam, memperluas pengalaman dan pengetahuan, dan menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan di masa depan. Contoh kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka merepresentasikan etika kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Pramuka dalam kurikulum merdeka masih terlaksana di jenjang sekolah menengah dan belum dihapuskan. Selanjutnya, integrasi etika pada asesmen mengenai literasi, numerasi, dan survei karakter. Integrasi etika dituangkan dalam pembuatan instrumen asesmen seperti materi yang tercantum dalam setiap instrumennya, dirancang untuk mengukur kompetensi dan pengetahuan yang relevan, hal ini akan merepresentasikan etika adil, tanggung jawab, dan etika tidak diskriminasi. Kemudian, integrasi etika dalam pembelajaran di jenjang sekolah menengah juga dapat diterapkan pada Proyek Penguatan Pelajar Pancasila (P5). Dicontohkan seperti penguatan kearifan lokal yang mana dapat menyelenggarakan festival kesenian tradisional dan eksplorasi budaya lokal setiap daerah, sehingga mampu merepresentasikan etika melestarikan, menghormati, dan menjunjung martabat budaya. Tidak hanya itu, penguatan pelajar Pancasila juga diimplementasikan pada kegiatan bazar produk karya, yang mana mengadakan program pengembangan usaha kecil di sekolah. Hal ini mampu mewujudkan nilai etika kerja keras, inovatif, dan keberanian. Integrasi etika dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka di jenjang sekolah menengah yang terakhir yakni menyatukan etika pada pembelajaran Project Based Learning (PBL). Kegiatan ini misalnya proyek desain poster, yang mana menciptakan desain poster dan mempresentasikan mengenai materi yang terkandung dalam desain poster tersebut, ini akan mengindikasikan pada etika pemecahan masalah.

Keempat, memasuki jenjang pendidikan tinggi. Karakteristik dari mahasiswa cenderung sudah memiliki kemampuan berpikir kritis dan perencanaan yang baik berdasarkan logika dan bukti data, motivasi intrinsik yang pesat untuk belajar dan terus mengembangkan diri, dan mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, perubahan, maupun tantangan. Dapat dikatakan bahwa kurikulum merdeka harus memuat fleksibilitas dalam penerapan pembelajaran hingga berfokus pada hasil belajar yang bermakna. Kurikulum merdeka semestinya juga dinamis yang berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Integrasi etika dalam pembelajaran kurikulum merdeka pada jenjang pendidikan tinggi dapat dilakukan dengan:

- a. Memasukkan nilai-nilai etika kedalam setiap mata kuliah. Tujuannya yakni mewujudkan mahasiswa yang tidak hanya mengandalkan keterampilan dan pengetahuan saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dalam menunjang karir. Integrasi pada mata kuliah ini, misalnya dalam program studi kebijakan pendidikan mengkaji kasus-kasus etika dalam praktik pendidikan, dimana mahasiswa diberikan studi kasus dan partisipasi keaktifan ditekankan dalam memberikan pandangan permasalahan disertai solusinya. Pendekatan pembelajaran tersebut mencerminkan pada etika kompeten dan profesional;
- b. Mengintegrasikan etika dalam pembelajaran Unit Kegiatan Mahasiswa. Integrasi etika ini bertujuan agar mahasiswa mampu belajar serta menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya dilakukan dengan menyusun pedoman etika Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang lugas dan terukur dan menjadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatannya. Mengadakan program kerja pelatihan etika secara berkala guna meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai urgensi etika. Hal ini membentuk etika integritas dan kepemimpinan;
- c. Mengintegrasikan etika pada pembelajaran kampus merdeka. Pembelajaran kampus merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa guna mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Kegiatan berdampak seperti kampus mengajar membuat mahasiswa dapat berkolaborasi dengan guru sebagai mitra guna mengembangkan strategi pembelajaran untuk sekolah dasar dan menengah, mahasiswa dapat berusaha meningkatkan literasi dan numerasi, dan meningkatkan adaptasi teknologi di sekolah dasar dan menengah, sehingga membuat mahasiswa memiliki bekal dalam penumbuhan etika manajemen tim, empati sosial, dan adaptif;
- d. Terakhir, mengintegrasikan etika dalam pembelajaran Tri Dharma pendidikan tinggi. Dilakukan pada pengajaran baik mahasiswa maupun dosen bahwa pelaksanaan tersebut melingkupi kejujuran dalam menyampaikan informasi, menghargai karya cipta, serta menjunjung nilai-nilai etika dalam materi pengajaran. Setelah itu, pada pelaksanaan penelitian yakni integrasi etika berdalih pada kebenaran mengenai metodologi, kejujuran dalam melaporkan

hasil, dan perlindungan hak-hak partisipan penelitian. Seterusnya, pada penerapan pengabdian kepada masyarakat. Integrasi etika mencakup keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Menegaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan manfaat yang tepat dan berkelanjutan (Chudzaifah, et al 2021).

## 8. Faktor Pendukung Integrasi Etika dalam Kurikulum Merdeka

Sebuah kebijakan kurikulum merdeka tentunya memiliki target untuk terlaksana secara tepat, sehingga dibutuhkan faktor pendukung untuk menopang implementasi kebijakan kurikulum merdeka supaya berjalan lancar dan efektif, serta mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Faktor pendukung dapat diurai menjadi dua, yakni faktor internal yang mana faktor yang diperoleh dari dalam diri manusia dan suatu entitas seperti organisasi atau institusi. Faktor internal meliputi kekuatan sumber daya manusia, budaya kebijakan atau institusi, dan sistem yang terdapat dalam entitas. Dapat diperoleh temuan mengenai faktor pendukung internal integrasi etika dalam kebijakan kurikulum merdeka diantaranya:

- a. Dukungan pimpinan setiap jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Peran pimpinan mampu meningkatkan komitmen serta kinerja, artinya dukungan pimpinan menyokong rasa percaya diri maupun motivasi peserta didik, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Pimpinan juga memberikan bimbingan dan arahan untuk melaksanakan kebijakan kurikulum merdeka dengan efektif. Pimpinan menegaskan peran penting untuk membentuk budaya berlandaskan etika setiap jenjang pendidikan baik dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Terakhir, pimpinan membina untuk meminimalisir hambatan yang akan terjadi dan memastikan bahwa kebijakan kurikulum merdeka mencapai tujuan yang diharapkan;
- b. Komitmen peserta didik, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Hal ini mengutarakan bahwa peserta didik yang berkomitmen akan menopang proses pembelajaran etika dalam kurikulum merdeka untuk terlibat aktif dan menginternalisasikan nilai etika, sehingga mutu pembelajaran akan meningkat. Komitmen peserta didik dan mahasiswa akan memberikan titik terang bahwa integrasi etika dalam kurikulum merdeka, mampu membantu peserta didik dan mahasiswa mengetahui potensinya dan berguna bagi lingkungannya. Berikutnya, yaitu komitmen guru dan dosen yang tentunya memengaruhi keberhasilan kualitas pembelajaran pada kurikulum merdeka. Guru dan dosen yang berkomitmen mengintegrasikan etika dalam pembelajaran kurikulum merdeka dapat menghidupkan pembelajaran yang bermakna, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan mahasiswa sesuai dengan latar belakangnya, serta mencapai potensi maksimalnya. Selain itu, guru dan dosen

yang berkomitmen terhadap integrasi etika dalam kurikulum merdeka mampu menumbuhkan kesadaran akan loyalitas guru dan dosen terhadap etika profesi serta memiliki rasa tanggung jawab akan perannya;

- c. Orientasi positif dari pemangku kebijakan. Ini menunjukkan urgensi bahwa pemangku kebijakan dalam menentukan kurikulum merdeka, peka untuk mengetahui integrasi etika akan meningkatkan kualitas kebijakan dan mutu pendidikan.

Dengan memperhatikan pentingnya etika dalam kurikulum merdeka akan membuka perspektif positif untuk mempertimbangkan solusi. Setelah mengetahui faktor pendukung internal, selanjutnya terdapat faktor eksternal yang mana faktor ini berasal dari luar kekuatan sumber daya yang terlibat secara langsung dan diluar sistem yang sedang dioperasikan, tetapi dapat memengaruhi dan mendukung proses serta hasil integrasi etika dalam kebijakan kurikulum merdeka. Faktor pendukung eksternal diantaranya:

- a. Kolaborasi orang tua dan masyarakat. Kedudukan keduanya tidak dapat diabaikan, karena orang tua berperan untuk mendampingi, mengawasi memotivasi, dan memberikan pengaruh positif untuk peserta didik dan mahasiswa di luar sekolah dalam menanamkan nilai-nilai etika pada pembelajaran di kehidupannya. Hadirnya orang tua menunjang kesesuaian antara nilai etika yang diajarkan di sekolah dengan nilai etika yang dilakukan di rumah, sehingga dapat membentuk karakter peserta didik dan mahasiswa lebih maksimal. Kolaborasi dengan masyarakat pembelajaran kurikulum merdeka bagi peserta didik dan mahasiswa mampu mengembangkan nilai etika kesadaran mengenai isu-isu pendidikan lokal, nasional, serta pentingnya partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Terlibatnya masyarakat membuat peserta didik dan mahasiswa akan memiliki pengalaman belajar yang bermakna dan pendalaman etika pada norma masyarakat baik saat dilaksanakannya proyek kolaboratif maupun ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Kolaborasi dengan masyarakat juga mengembangkan etika sosial seperti meningkatkan tata cara berkomunikasi maupun menjaga adat istiadat;
- b. Perkembangan zaman. Hal ini membawa relevansi kurikulum merdeka dengan kebutuhan peserta didik dan mahasiswa mempersiapkan untuk memegang teguh etika sebagai pengendalian diri dalam menghadapi tantangan yang terus bekesinambungan. Perkembangan zaman, membawa arus kurikulum merdeka untuk menyelaraskan mutu pendidikan dengan etika sebagai acuan dasarnya.

## **9. Faktor Penghambat Integrasi Etika dalam Kurikulum Merdeka**

Perlu diingat, faktor penghambat tidak membuat putus asa kebijakan kurikulum merdeka untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, menjadi tantangan untuk menyikapinya secara bijak sehingga memperoleh solusi

dalam menangani permasalahannya. Faktor penghambat juga terbagi menjadi dua indikator yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor penghambat secara internal mengenai integrasi etika dalam implementasi kurikulum merdeka diantaranya (Awalludin, et al 2024):

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana. Mengapa demikian, karena sarana dan prasarana menjadi fondasi dalam keberhasilan proses pembelajaran pada kurikulum merdeka. Peserta didik dan mahasiswa akan cenderung mudah untuk memahami materi pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang baik jika sarana dan prasarana di setiap jenjang sekolah dasar, menengah, dan tinggi terpenuhi. Namun kenyataannya, problematika sarana dan prasarana kerap terjadi seperti laboratorium untuk pembelajaran berbasis proyek yang tidak memenuhi kualifikasi, kurangnya penyediaan modul ajar yang selaras dengan kurikulum merdeka dapat menghambat guru dan dosen dalam merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang optimal, dan tidak kalah krusialnya yakni masih terdapat sarana dan prasarana yang sulit diakses oleh peserta didik, mahasiswa, dan guru atau dosen seperti kondisi bangunan serta lokasi institusi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang terpencil dapat mengganggu proses pembelajaran kurikulum merdeka;
- b. Kurangnya pelatihan guru dan dosen. Hal ini terjadi karena masih adanya beban administrasi (daftar hadir, jurnal kelas, dan jurnal pembelajaran) guru dan dosen pada pembelajaran kurikulum merdeka, sehingga berdampak pada minimnya waktu untuk terlibat dalam pelatihan kurikulum. Minimnya pelatihan menimbulkan guru dan dosen mengembangkan teknik pembelajaran yang inovatif, sehingga pelaksanaan pembelajaran menjadi kurang interaktif.

Faktor penghambat eksternal integrasi etika dalam kurikulum merdeka yakni:

- a. Adanya konflik SARA (Suku, Agama, dan Ras). Konflik ini dapat berpengaruh pada terhambatnya kurikulum pendidikan, karena menyebabkan ketidakharmonisan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengubah pandangan atau orientasi peserta didik bahwa integrasi etika itu sesuatu yang percuma; dan
- b. Pengaruh media dan teknologi. Faktor ini dapat menghambat karena tidak dikelola secara baik dan tepat, terutama terkait kesiapan, aksesibilitas, dan keamanan data. Tidak seluruh peserta didik dan mahasiswa memiliki kesempatan yang sama terhadap teknologi, ini dapat menciptakan kesenjangan pada mutu pendidikan dan pembelajaran kurikulum merdeka, etika untuk penggunaan teknologi sulit untuk diadopsi secara kolektif. Tidak hanya itu, pengaruh teknologi juga menimbulkan peserta didik menjadi ketergantungan jika tidak didukung dengan pengawasan, sehingga dapat mengganggu perkembangan menjiwai etika dalam dirinya.

## 10. Solusi Permasalahan Integrasi Etika dalam Kurikulum Merdeka

Solusi diyakini sebagai penyelesaian atau pemecahan masalah yang dapat merekomendasikan jalan keluar. Solusi dilakukan secara konkrit melalui tindakan untuk mengatasi kesulitan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya: (a). Evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh setiap sekolah baik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Evaluasi kurikulum merdeka dengan waktu berkala untuk menentukan apakah kurikulum merdeka yang diterapkan di setiap sekolah dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi berhasil menuju tujuan yang ditetapkan. Evaluasi berkala mampu mengidentifikasi kekurangan dan kekuatan kurikulum merdeka khususnya pengintegrasian etika dalam pembelajaran. Evaluasi berkala juga memberikan refleksi bersama pada peserta didik, guru, dan pimpinan untuk meningkatkan usaha pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini menunjukkan bahwa selaras dengan tinjauan pustaka mengenai tahap-tahap kebijakan pendidikan, setelah implementasi sangat penting dilakukan evaluasi; (b). Mengupayakan pelatihan guru. Dinas Pendidikan di setiap wilayah pendidikan jenjang dasar dan menengah berkoordinasi dengan setiap sekolah untuk memastikan pelatihan guru yang dapat berupa kegiatan bimbingan teknis dan penataran etika dalam kurikulum merdeka, maupun metode pengajaran pada kurikulum merdeka. Guru juga dilatih dalam menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran; (c). Penguatan literasi digital. Solusi tersebut, dengan memberikan pemahaman atau edukasi pada peserta didik dan mahasiswa mengenai fungsi teknologi secara tepat guna, membaca seksama secara digital sekaligus diajarkan untuk menyelektif informasi yang beredar, dan sekolah melalui pimpinan serta guru dapat memsosialisasikan bahaya bullying dan urgensi etika digital pada peserta didik; (d). Alokasi anggaran pendidikan secara bijaksana. Anggaran ini berupa Dana Operasional Satuan (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dan dana khusus program merdeka belajar untuk penunjang pelaksanaan kurikulum merdeka termasuk pengadaan, pelengkapan infrastruktur, dan pengadaan buku. Dana BOS dan BOP masih menemui kendala yakni beberapa sekolah belum memahami operasional BOS/BOP, riskan penyalahgunaan dana BOS dan BOP yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kurikulum merdeka, minimnya pengelolaan keuangan dan pengawasan menimbulkan permasalahan penyalahgunaan data. (Wijaya, et al 2022).

## D. KESIMPULAN

Ditarik kesimpulan bahwa integrasi dan pengakuan etika dalam kurikulum merdeka menjadi refleksi terhadap pendidikan di Indonesia tidak sekadar mengandalkan kademis semata, tetapi juga pembentukan karakter, meningkatkan manusia untuk bermartabat, dan resiliensi dalam menghadapi tantangan

kehidupan yang kompleks. Urgensi etika dalam kurikulum merdeka juga memengaruhi bagaimana etika dalam kurikulum merdeka dipahami, diajarkan, dan diterapkan. Integrasi etika dalam kurikulum merdeka mengacu pada tiga pilar peradaban bangsa Indonesia yakni Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Integrasi etika dalam kurikulum merdeka juga berperan untuk memberikan pemahaman bagaimana etika dapat diterapkan di dunia nyata. Dari pemaparan hasil dan pembahasan, maka perwujudan mengenai teori etika dalam kurikulum merdeka ini selaras dengan teori etika utilitarian, karena menoptimalkan kesejahteraan dan kebaikan bagi peserta didik atau mahasiswa dan subyek penopang lainnya seperti pimpinan institusi setiap jenjang, guru, dan dosen. Integrasi etika dalam kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran fleksibel, inklusif, dan bermakna dengan kebutuhan peserta didik. Teori utilitarian dalam mengintegrasikan etika pada kurikulum merdeka dapat menjadi keputusan, penentuan materi yang diajarkan, dan mempertimbangkan dampak positif terbesar bagi peserta didik. Selain itu, teori keberagaman juga dibuktikan dalam peleburan etika pada kurikulum merdeka. Hal ini, menekankan pentingnya perbedaan peserta didik, memacu pembelajaran berdiferensiasi, dan pendekatan multikultural dalam pembelajarannya. Integrasi etika dalam kurikulum merdeka memiliki faktor pendukung dan penghambat baik secara internal maupun eksternal. Keduanya saling berkaitan, dalam melihat efektivitas pelaksanaan kurikulum merdeka. Faktor penghambat, bukan menjadi penghalang dan melemahkan sistem dari integrasi etika pada kurikulum merdeka tetapi bagaimana menemukan solusi untuk menimalisir kendala yang terjadi, sehingga penulis juga memamparkan solusi permasalahannya.

## Referensi

- Amalia, R., Abdullah., Putra, A., & Martha, A. (2025). Mengintegrasikan Etika dalam Kepemimpinan Pendidikan Global Berbasis Budaya. *Jurnal: Pendidikan Tambusai*, 9(1), 2113-2118.
- Amanulloh, M.J.A & Wasila, Nur F.W. Implementasi dan Pengembangan Kurikulum Merdeka dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Nusantara: *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 34-58.
- Anri, Andi F.R. (2024). Pendidikan dan Etika Sebagai Salah Satu Jalan Menuju Keadilan Sosial Bagi Umat Manusia: Refleksi Pemikiran John Dewey. *Jurnal: Kariwari Smart*, 4(1), 27-38.
- Awalludin., Aisyah N., Cahyani, I., & Mustafiyanti. (2024). Prinsip dan Faktor yang Memengaruhi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Yudistra: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa*, 2 (3), 120-127.

- Bustaman, M.(2022). Karakteristik Anak Usia Pendidikan Menengah. *Jurnal: Al- Fijrah*, 11(1), 14-28.
- Chudzaifah, I., Hikmah, A.N., & Pramudiani, A. Tridharma Perguruan Tinggi; Sinergitas Akademisi dan Masyarakat dalam Membangun Peradaban. (2021). Al-Khidmah: *Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat*, 1(1), 80-91.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irawati, D., Natsir, N.F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam”. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870-880.
- Magay, D & Ismanto, B. (2024). Peran Filsafat dan Etika dalam Pembentukan Kebijakan Pendidikan Bermutu. *IjoEd: Indonesian Journal on Education*, 1(2), 109-113.
- Muna, Elya N. (2024).Peran Guru Dalam Mengembangkan Nilai Etika Moral Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal: Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah*, 4(3), 115-122.
- Nasution, A.S. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Etika Islam dalam Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini: Sebuah Kajian Konseptual. *Jurnal: Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 4(3), 277-287.
- Permendikbud. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Pratiwi, Dyan. (2024). *Kebijakan Pendidikan*. Cetakan ke-1. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Putri, Z.F & Maula, N. (2024). Studi Literatur: Transformasi Kurikulum Indonesia 1947 Sampai Kurikulum Merdeka Dilihat dari Perspektif Model Kurikulum, *TEKNODIK: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 28(1), 77-93.
- Rambe, A., Tobroni., & Widodo, J. (2024). Integrasi Etika Pendidikan dan Keterikatan Sosial Dalam Pembelajaran Holistik. *Jurnal Ilmu Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 697-703.
- Tanyid, M. (2024). Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan. *Jurnal: Jafray*, 12(2), 216-230.
- Wijaya, I.M.A., Wijaya, P.E.P., Sudiarta, I.N., & Sutika, I.M. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program

Merdeka Belajar. *Jurnal: Kajian Pendidikan Universitas Dwijendra*, 13(2), 133-144.

Wirata. (2024). *Etika Dalam Kebijakan (Memahami Implikasi Moral Dari Keputusan Publik)* Cetakan ke-1. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Yusuf, I.M. (2017). *Etika vs Etiket (Suatu Telaah Tentang Tuntutan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik)*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(2). 60-78.